

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 A model of policy Implementation

Implementasi ialah realisasi atau aksi kerja nyata dari suatu rancangan yang telah disusun secara bertahap dan rinci. Implementasi berasal dari bahasa Inggris “*implement*” yang berarti pelaksanaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan yang berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan dan penerapan kewajiban. Istilah implementasi merujuk pada beberapa kegiatan yang mengikuti pernyataan dengan maksud tujuan program dengan hasil yang diinginkan oleh pejabat ataupun pemerintah (Nasution & Nurwani, 2021).

Dalam proses kebijakan publik implementasi/penerapan kebijakan menjadi tahapan yang sangat penting untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Implementasi dapat di sebut dengan pernyataan kebijakan (policy statement) dimana terdapat kebijakan yang di putuskan akan dilaksanakan melalui beberapa langkah yang konkrit (Nasution & Nurwani, 2021). Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2007:144) pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk

menerapkan kebijakan guna mencapai tujuan, kebijakan, dan program adalah makna implementasi jika dipandang secara luas.

A Model of the Policy Implementation adalah model pendekatan implemenasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn (1975). Model ini menggambarkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear atau tertuju untuk keputusan politik, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi
5. Disposisi atau sikap para pelaksana
6. Lingkungan sosial, politik dan ekonomi

2.1.2 Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam pencapaian suatu target, sasaran atau suatu tujuan yang ditentukan sebelumnya (Grandis, 2018). Efektifitas adalah ukuran mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan suatu organisasi. Teori efektifitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (1985) menyatakan bahwa terdapat 3 indikator yang dapat mengukur efektifitas yaitu:

1. Pencapaian Tujuan

Keseluruhan upaya untuk mencapai keberhasilan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Dengan menggunakan indikator pencapaian tujuan suatu kebijakan untuk melihat tingkat efektivitas kebijakan tersebut melalui seberapa jauh pencapaian kebijakan tersebut dalam melaksanakannya dengan tujuan yang telah dibuat.

2. Integrasi

Integrasi adalah pengukuran untuk melihat tingkat kemampuan dan potensi suatu kebijakan dengan menilai berdasarkan seberapa jauh kemampuan dan potensi yang dimiliki. Integrasi dapat dilihat melalui sosialisasi, pengembangan konsensus, komunikasi dengan organisasi lain dan faktor pendukung lainnya.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian yang dilakukan untuk menyelaraskan individu atau organisasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan. Suatu kebijakan yang di terapkan harus beradaptasi dengan lingkungan, jika kebijakan tersebut tidak akan bermasalah pada lingkungan maka dapat dikatakan mampu beradaptasi. Untuk itu efektivitas suatu kebijakan dapat dinilai berdasarkan adaptasinya.

2.1.3 Sistem Informasi

Sistem informasi dikenal juga dengan *software* yang membantu pengelolaan dan juga analisis data, sistem informasi bertujuan untuk mengubah

data mentah menjadi informasi yang bermanfaat bagi suatu organisasi, instansi atau perusahaan. Menurut Hutahean (2018) Sistem informasi adalah sistem dalam organisasi yang bertujuan melengkapi seluruh keperluan manajemen dan mendukung aktivitas secara umum dalam menyajikan laporan yang di butuhkan.

Sistem Informasi menurut Gordon B. Davis (1991:91) adalah suatu sistem yang menerima input atau masukan data dan instruksi, mengolah data sesuai dengan instruksi, mengolah data sesuai dengan instruksi dan mengeluarkan hasilnya. Sistem Informasi Pemerintah merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah Negara dan kesejahteraan rakyat. Dengan berkembangnya teknologi, pemanfaatannya tidak terbatas hanya di bidang industri saja tetapi juga membantu dan mendukung kegiatan dari pemerintahan.

2.1.4 Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah suatu sistem yang mendokumentasi, administrasi dan juga mengelola data serta menjadikannya menjadi sebuah informasi yang disajikan kepada masyarakat dan juga sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan dan juga evaluasi pemerintah daerah. Dengan diselenggarakannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terpadu nasional sangat penting diwujudkan menuju *Good Governance* dan menghasilkan suatu daya yang akurat dan juga terintegrasi mulai dari daerah hingga ke pusat. SIPD diciptakan guna memudahkan pekerjaan di tiap

derah. Efektif, efisien, ekonomis, akuntabel, dan transparan adalah tujuan dibentuknya SIPD.

Pemerintah berinovasi dalam perencanaan dan pembangunann sehingga terbitlah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang mengatur teknis pengelolaan SIPD sesuai dengan kebutuhan pemerintah, industri dan juga masyarakat pada saat ini. Selain itu, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daeah dan informasi Pemerintah Daerah lainnya yang saling terhubung dan dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 mengatur jenis SIPD dan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok sebagai berikut:

1. Informasi Pembangunan Daerah

Mengelola data informasi terkait dengan perencanaan pembangunan daerah. SIPD mampu memfasilitasi penyusunan RPJD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD, dan RENJA PD sehingga analisis profil pelaksanaan pembangunan daerah mudah di peroleh dan mampu menjadi dasar pembaharuan data dan informasi peerencanaan pembangunan daerah.

2. Informasi Keuangan Daerah

SIPD mampu megelola data keuangan daerah, proses pengelolaan keuangan daerah yang di maksud meliputi:

- a. Perencanaan Anggaran Daerah

- b. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
 - c. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan daerah
 - d. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah
 - e. Barang Milik Daerah
 - f. Informasi Keuangan Daerah Lainnya
3. Informasi Pemerintah Daerah Lainnya

SIPD memberikan informasi umum lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, informasi umum tersebut berupa Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) selama satu tahun, PERDA, dan informasi umum lainnya yang dikelola oleh berbagai elemen terkait.

2.1.5 Pengelola Keuangan Daerah

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 3 Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan kepatuhan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah pasal 1 Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

2.2 Riset Sebelumnya

Adapun hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini adalah sebagai berikut:

2.2.1 Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan.

Penelitian ini dilakukan oleh Nasution dan Nurwani (2021), dengan judul Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Irfan Nasution dan Nurwani pada tahun 2021 yang bertempat di BPKAD Kota Medan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Informan pada penelitian ini adalah orang-orang yang diyakini dapat memberikan informasi yang akurat dan yang bertanggung jawab dalam menangani SIPD yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan dan Ketua Bidang Anggaran BPKAD Kota Medan. Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kota Medan dengan menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn.

Hasil dari penelitian ini adalah BPKAD kota Medan telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk melakukan kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan berbagai hal. Namun penerapannya

belum terlaksana dengan baik dikarenakan oleh kurangnya efisiensi dari segi waktu dan juga diperlukan bimbingan teknis untuk SKPD yang belum terbiasa menggunakan SIPD.

2.2.2 Efektifitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD Dalam Penyusunan Dokumen RKPD di Kabupaten Nganjuk

Penelitian ini dilakukan oleh Nanda Dias Ekaputra pada tahun 2021 dengan judul Efektifitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD di Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan 2 sumber data yaitu, data primer yang akan dikumpul berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen, buku, artikel, dan dokumentasi. Adapun responden pada penelitian ini yaitu Kepala Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi atau staf, Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan Bappeda, Kepala Sub Bidang Pendataan Bappeda, dan 3 orang staf verifikator SIPD di Bappeda Kabupaten Nganjuk.

Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan SIPD masih kurang efektif pada tahun pertama penerapannya. Hambatannya adalah kurangnya pemahaman terhadap aplikasi dan perubahan nomenklatur program kegiatan yang membingungkan Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan dokumen RKPD.

2.2.3 Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Perolehan Opini Audit BPK Tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga

Penelitian ini dilakukan oleh Nadya Prameswari (2021) yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Perolehan Opini Audit BPK Tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner dan teknik pengambilan sampel adalah *Purposive Random Sampling*, dengan jumlah responden 68 orang. Model analisis data dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda yang diolah menggunakan *Software* pengolah data statistik versi 20.

Hasil dari penelitian ini adalah penerapan SIPD berpengaruh terhadap perolehan Opini Audit BPK di Kabupaten Purbalingga, Kualitas LKPD berpengaruh terhadap Perolehan Opini Audit BPK di Kabupaten Purbalingga. Penerapan SIPD dan kualitas LKPD secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable dependen yakni perolehan Audit BPK.

2.2.4 Implementasi Aplikasi Sistem Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat

Najamudin (2022) penelitian ini dilakukan oleh Laura Fahzura dan Najamudin penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan

deskriptif dengan lokasi penelitian yang bertempat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Barat. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 5 orang yang merupakan pejabat yang bertanggung jawab penuh atas terlaksananya kebijakan SIPD antara lain Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat, Sekrearis, Kepala Sub bagian Program dan Keuangan, Bendahara, dan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian. Fokus pada penelitian ini adalah Implementasi SIPD pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Hasil dari penelitian ini adalah pengaplikasian SIPD di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat Belum Optimal karena dalam pelakasanannya masih terdapat kendala yaitu pada bagian penatausahaan masih menggunakan aplikasi SIMDA, belum tersosialisasi secara merata antara Bappeda dan setiap SKPD, SDM yang tidak kompeten, dan jaringan pada server yang sering eror.

2.2.5 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Sari dan Syafina (2022) penelitian ini dilakukan di Labuhanbatu Selatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Sub Bagian Program yang berperan langsung dalam menggunakan SIPD.

Hasil dari penelitian ini adalah implementasi SIPD pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum diterapkan secara

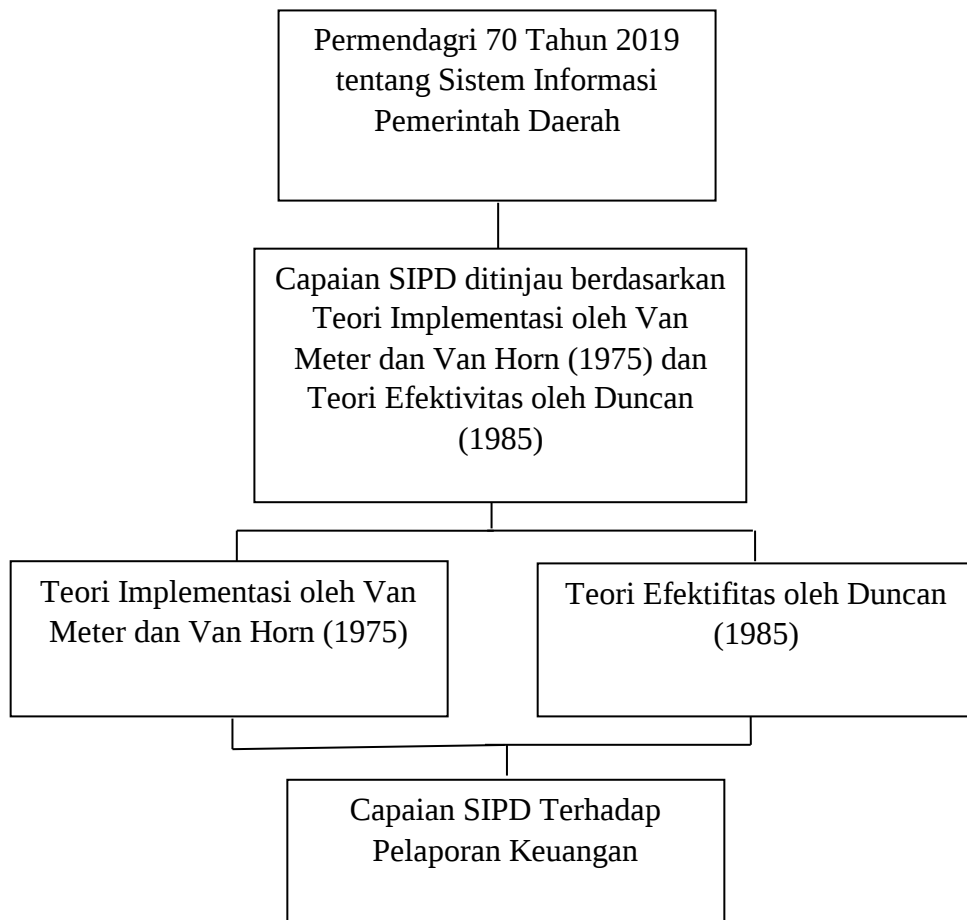
optimal. Adapun kendala yang dihadapi adalah minimnya pengadaan Bimbingan Teknologi (Bimtek), kualitas sumber daya manusia yang belum memahami pengoperasian sistem, dan menunggu persetujuan admin untuk dapat masuk melihat informasi.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini merupakan langkah ilmiah pengumpulan data kualitatif deskriptif dikaitkan dengan teori atau konsep maupun hasil-hasil penelitian sebelumnya, terhadap penelitian yang telah dipilih sesuai dengan identifikasi masalah. Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada Permendagri No. 77 Tahun 2020 dan teori efektivitas oleh Duncan (1985).

Gambar 2.3

Kerangka Berpikir Konseptual



Sumber : Peneliti, 2023